

skripsi elizabeth

by Elizabeth Olivia

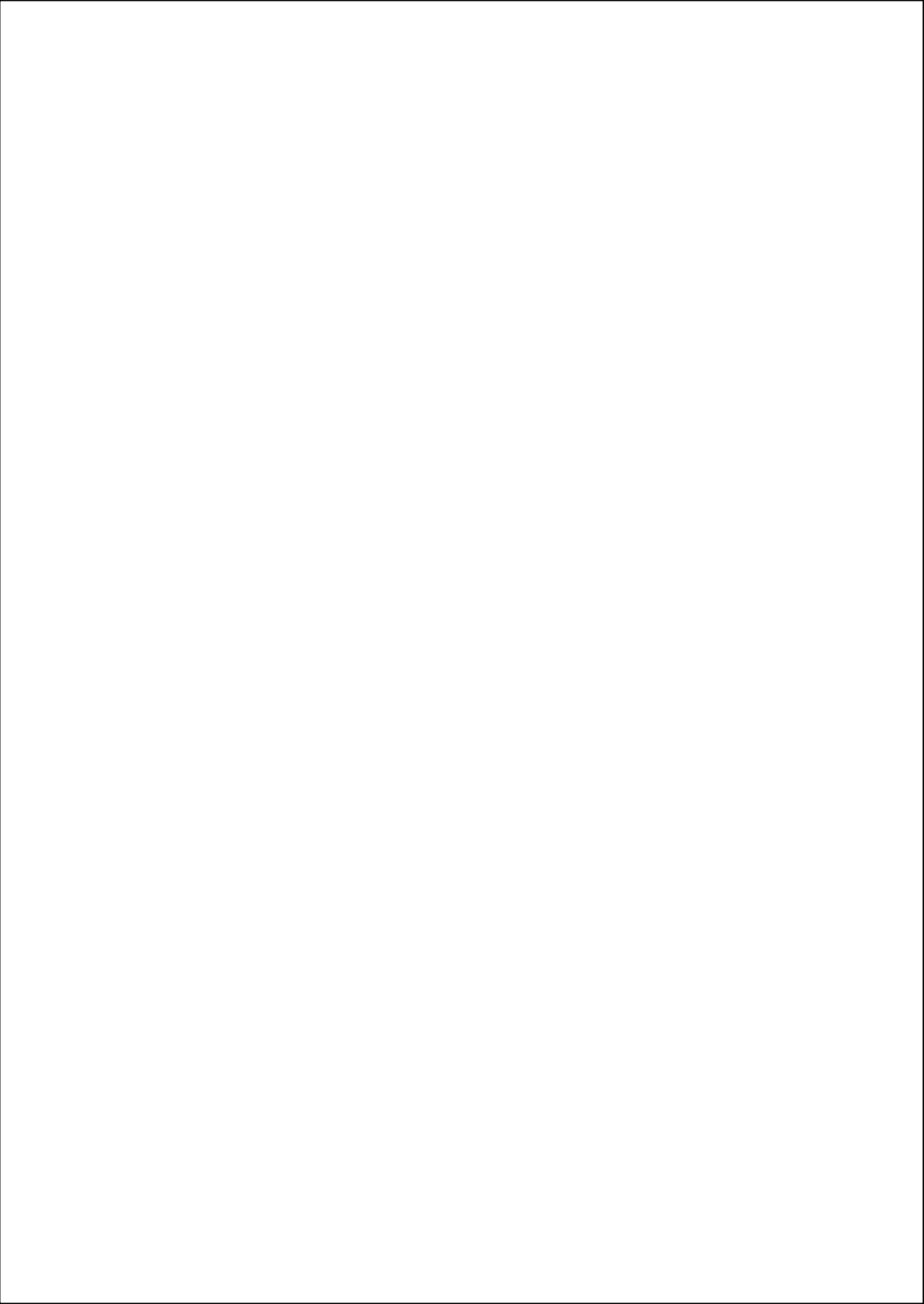
Submission date: 18-Jun-2026 03:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2985421331

File name: Bab_1,4,5_Elizabeth_Olivia (352.68K)

Word count: 6497

Character count: 43575



BAB 1

²⁵ PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter, keterampilan, wawasan diperlukan dalam menghadapi tantangan global (Nugraha *et al.*, 2024). Dalam konteks sosial dan ekonomi, pendidikan juga sering dikaitkan dengan peluang pekerjaan yang lebih baik. Saat ini, banyak perusahaan maupun instansi pemerintah menetapkan syarat minimal pendidikan tertentu bagi para pelamar kerja (Dahlan & Anggoro, 2021). Kondisi ini membuat pendidikan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan posisi seseorang di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Tidak hanya sebagai alat mobilitas vertikal, pendidikan juga menjadi sarana untuk memperkuat daya saing bangsa dalam kancah

internasional (Indriyanto, 2012).

Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan sangat berkaitan erat dengan meningkatnya angka pengangguran. Ketika masyarakat tidak memiliki pendidikan yang memadai, mereka sulit untuk bersaing di pasar kerja, yang menyebabkan pengangguran meningkat (Mulyadi, 2017). Akibatnya, beban ekonomi keluarga semakin berat dan dapat mendorong keluarga tersebut masuk dalam kategori miskin. Kemiskinan dan pendidikan menjadi dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Banyak pihak menyebut bahwa kemiskinan kerap terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, dan sebaliknya, pendidikan sulit diakses karena adanya kemiskinan (Ali, 2017). Lingkaran ini menjadi masalah sosial yang terus berulang jika tidak diintervensi secara sistematis dan adil oleh pemerintah. Selain itu, ketimpangan akses pendidikan antar wilayah juga memperparah kondisi, karena daerah-daerah tertinggal cenderung memiliki angka putus sekolah yang tinggi.

Dalam konteks pemenuhan hak pendidikan di Indonesia, kemiskinan menjadi faktor penghambat yang paling signifikan. Masyarakat miskin sering kali tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik dari sisi pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari (Lestari, 2025). Di sinilah peran negara menjadi penting dalam ³⁰menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat menikmati hak dasar tersebut dan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan layanan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses secara adil dan menyeluruh oleh setiap anak bangsa. Secara umum, dalam periode sepuluh tahun terakhir ³⁹tingkat kemiskinan di Kota Surabaya cenderung

mengalami penurunan.

**Tabel 1. 1 Jumlah Presentase Penduduk Miskin Kota Surabaya
Tahun 2015-2024**

Tahun	(rupiah per kapita sebulan)	Miskin (ribu jiwa)	Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	418.930	165,72	5,82
2016	438.283	161,01	5,63
2017	474.365	154,71	5,39
2018	530.178	140,81	4,88
2019	567.474	130,55	4,51
2020	592.137	145,67	5,02
2021	611.466	152,49	5,23
2022	652.540	138,21	4,72
2023	718.370	136,37	4,65
2024	742.678	116,62	3,96

Sumber: surabayakota.bps.go.id

Berikut tabel I.I diatas merupakan jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya mengalami penurunan selama periode 2015 hingga 2024. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 165,72 ribu jiwa, kemudian menurun menjadi 116,62 ribu jiwa pada tahun 2024. Dengan demikian, terjadi pengurangan sebesar 49,1 ribu jiwa. Selain itu, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 5,82 persen pada tahun 2015 menjadi 3,96 persen pada tahun 2024, atau turun sebesar 1,86 poin persentase.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang pendidikan, pemerintah menyelenggarakan Program Indonesia Pintar. Pelaksanaan program ini didukung oleh Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses serta kualitas pendidikan di Kota Surabaya, sekaligus memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan yang

diberikan kepada anak usia sekolah antara 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin maupun rentan miskin. Program ini juga ditujukan kepada pemegang ¹⁰ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu, penyandang disabilitas, serta anak yang terdampak bencana alam atau musibah lainnya. Melalui program ini, pemerintah berupaya mendukung keberlangsungan pendidikan dan mengurangi risiko putus sekolah pada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

³² Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai identitas penerima bantuan pendidikan dalam Program Indonesia Pintar yang bertujuan mengurangi angka putus sekolah akibat faktor ekonomi. Namun, pelaksanaan



program ini di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, masih menghadapi beberapa kendala. Masih ditemukan siswa dari keluarga mampu yang menerima KIP, sementara terdapat siswa ⁴⁰ dari keluarga kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Padahal, program ini ⁴⁶ ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin agar memperoleh akses pendidikan yang layak.

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Peserta Didik yang Lolos dan Tidak Lolos Seleksi KIP

Berdasarkan grafik diatas Permasalahan yang timbul di lapangan mencerminkan adanya ketidaktepatan dalam pendataan dan seleksi penerima manfaat. Sejumlah keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima Kartu Indonesia Pintar justru tidak terdata, sementara ada pula siswa dari keluarga yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan tersebut (Herlinawati *et al.*, 2018). Ketidaktepatan ini disebabkan oleh penggunaan data lama, minimnya verifikasi di lapangan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ⁶⁴ oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan (Triyas *et al.*, 2023). Ketidakakuratan data yang menjadi dasar pemberian bantuan berisiko membuat kebijakan yang seharusnya adil menjadi tidak tepat sasaran.

Tabel 1. 2 Permasalahan Pendataan Penerima KIP

No	Kendala	Masalah Spesifik	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Status Ekonomi	Keluarga terkategori sudah mampu	10	43.5%
2.	Validasi Data	Nik kosong atau format tidak sesuai	6	26,1%
3.	Kriteria Penghasilan	Gaji orangtua melebihi batas max (5 juta)	2	8,7%
4.	Integritas Sistem	Data Identitas tidak ditemukan di Pusat	2	8,7%

5.	Validasi Identitas	NISN tidak Valid atau tidak diisi	1	4,3%
6.	Status Duplikasi	Identitas sudah terdaftar pada SK lain	1	4,3%
7.	Ketentuan Perbankan	Rekening tidak aktif (siswa kelas akhir)	1	4,3%
Total				23 100%

Kelurahan Gunung Sari merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dengan luas wilayah 1,63 km² dan jumlah penduduk mencapai 14.015 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 8.625 jiwa/km² (BPS Kota Surabaya, 2023). Kondisi kependudukan ini menggambarkan perlunya perhatian serius dalam bidang pelayanan publik, termasuk pendidikan, karena kepadatan populasi sering kali menimbulkan kesenjangan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Secara demografis, Gunung Sari memiliki karakteristik yang beragam, baik dari sisi usia produktif maupun tingkat pendidikan, sehingga menjadi gambaran nyata tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pendidikan.

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian warga Gunung Sari belum mendapatkan pendidikan yang layak. Terdapat 2766 jiwa yang belum atau tidak pernah sekolah dan 697 jiwa yang tidak tamat SD, sementara yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar hanya 1.184 jiwa. Pada jenjang menengah pertama, terdapat 1.387 jiwa tamat SLTP, dan pada jenjang menengah atas sebanyak 6.009 jiwa tamat SLTA/ sederajat. Untuk jenjang pendidikan tinggi, jumlahnya relatif lebih kecil, yakni 112 jiwa lulusan D1/D2, 302 jiwa lulusan D3, 1.430 jiwa lulusan

S1, 84 jiwa lulusan S2, dan hanya 6 jiwa lulusan S3 (BPS Kota Surabaya, 2023). Gambaran ini memperlihatkan masih adanya ketimpangan dalam pencapaian pendidikan masyarakat, di mana kelompok dengan pendidikan rendah masih mendominasi, sementara jumlah yang berhasil melanjutkan ke pendidikan tinggi relatif terbatas.

Tabel 1.3 Data Jiwa Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan Gunung Sari

⁴¹ No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1398 orang	1368 orang	2766 orang
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	361 orang	336 orang	697 orang
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	482 orang	702 orang	1184 orang
4.	SLTP/SEDERAJAT	658 orang	729 orang	1387 orang
5.	SLTA/SEDERAJAT	3157 orang	2852 orang	6009 ²⁹ orang
6.	DIPLOMA I/II	46 orang	66 orang	112 ²⁹ orang
7.	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	127 orang	175 orang	302 orang
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	654 orang	776 orang	1430 orang
9.	STRATA II	53 orang	31 orang	84 orang
10.	STRATA III	2 orang	4 orang	6 orang

Sumber: pemerintahan.surabaya.⁶³go.id

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan serta adanya beberapa fenomena yang telah terjadi, memunculkan ide dan pemikiran yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh pakis Kota Surabaya".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yakni "Bagaimanakah Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar(KIP) sebagai upaya pemenuhan hak Pendidikan di kelurahan Gunungsari kecamatan Dukuh pakis Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

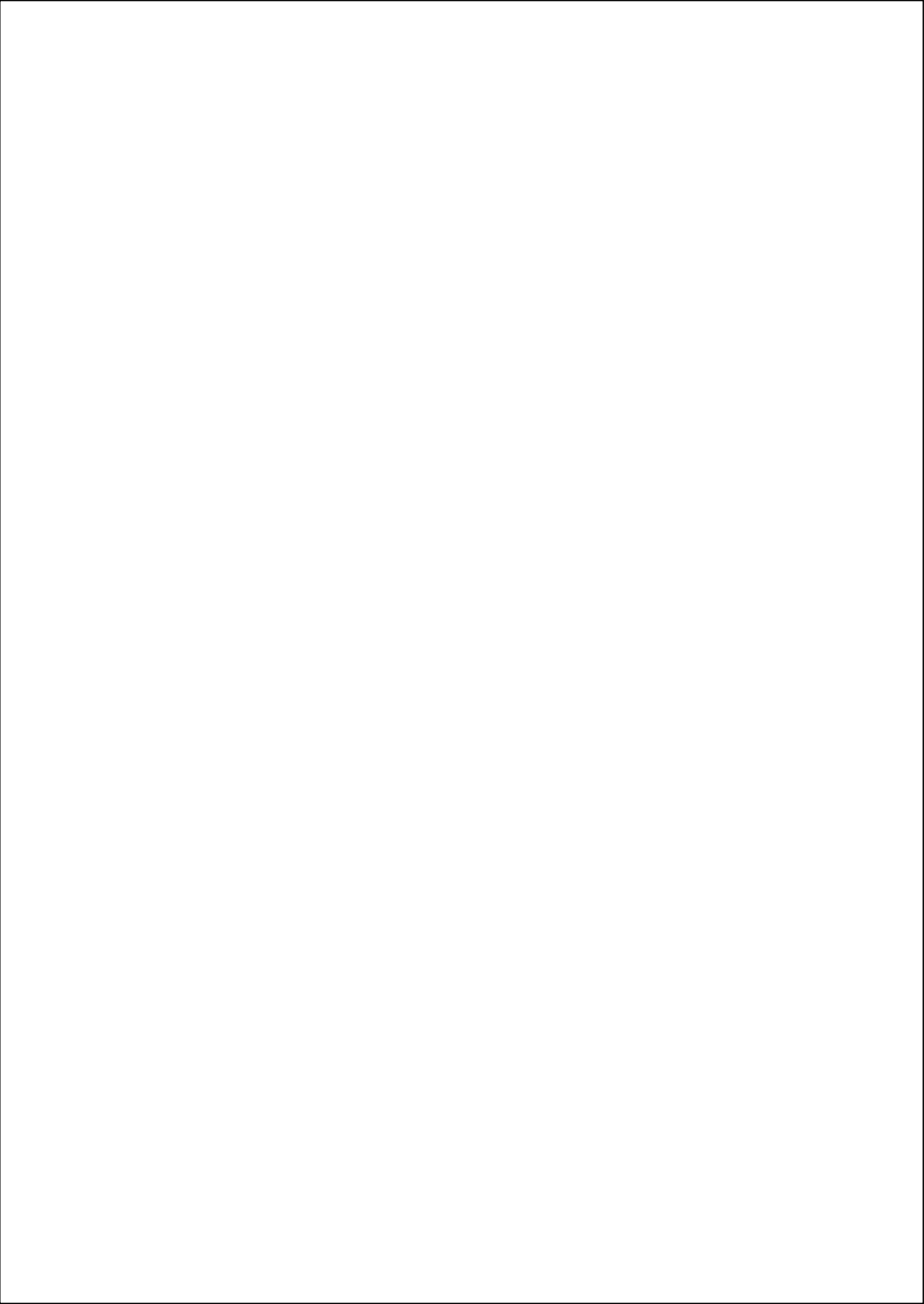
Untuk menganalisis implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam menjamim pemenuhan hak pendidikan di kelurahan Gunungsari kecamatan Dukuh pakis Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai referensi pembaca dan juga bermanfaat sebagai perkembangan ilmu social dan ilmu politik khususnya seputar implementasi kebijakan.

Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai masalah yang diteliti serta diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan msukan bagi kelurahan Gunungsari kecamatan Dukuh pakis.

Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu agar masyarakat dapat mengetahui peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan dapat diciptakan dari kesejahteraan Pendidikan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek utama dalam penelitian ini difokuskan pada wilayah administratif Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, yang menjadi lokasi implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kelurahan Gunungsari merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Dukuh Pakis dengan luas wilayah 1,63 km² dan jumlah penduduk mencapai 14.015 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 8.625 jiwa/km² (BPS Kota Surabaya, 2023). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena ketidaktepatan penyaluran dana KIP di wilayah tersebut, di mana masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang menerima bantuan, sementara siswa dari keluarga tidak mampu justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

4.1.1 Profil Kelurahan Gunungsari

Kelurahan Gunungsari merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Secara geografis, kelurahan ini memiliki luas wilayah sebesar 1,63 km² dengan batas-batas administratif sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Pakis, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Baratajaya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Kupang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Putat Jaya.

Berdasarkan data BPS Kota Surabaya tahun 2023, jumlah penduduk Kelurahan Gunungsari mencapai 14.015 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 8.625 jiwa/km². Kondisi kependudukan yang cukup padat ini menjadikan Kelurahan Gunungsari sebagai salah satu kawasan yang memerlukan perhatian serius dalam hal pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu instrumen kebijakan yang sangat relevan untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di wilayah ini.



Gambar 4.1 Halaman Depan Kelurahan Gunungsari, Surabaya

Sumber : Peneliti Sendiri

Dari aspek tingkat pendidikan penduduk, data registrasi tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 2.766 jiwa yang belum atau tidak pernah sekolah, 697 jiwa yang tidak tamat SD, dan 1.184 jiwa yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Gambaran ini memperlihatkan masih adanya ketimpangan dalam pencapaian pendidikan masyarakat di Kelurahan Gunungsari, sehingga program bantuan pendidikan seperti KIP menjadi sangat krusial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak.

4.1.2 Profil SDN Gunungsari sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya

SDN Gunungsari I merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang berlokasi di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Sekolah ini menjadi salah satu lokasi penerima dan penyalur Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di wilayah Kelurahan Gunungsari. Sebagai sekolah negeri yang melayani masyarakat di sekitar kelurahan, SDN Gunungsari I memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu dapat mengakses bantuan pendidikan melalui program KIP.

Dalam struktur organisasinya, SDN Gunungsari I dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi sekolah termasuk pendataan dan penyaluran dana KIP kepada siswa yang berhak. Di bawah kepala sekolah, terdapat tenaga pendidik dan

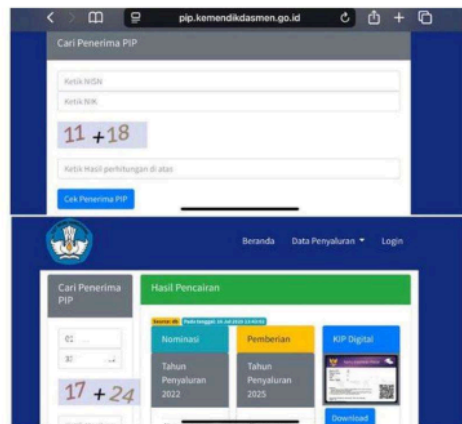
kependidikan yang turut berperan dalam proses verifikasi data dan pendampingan siswa penerima KIP melalui program SIPINTAR. Koordinasi antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan kelurahan menjadi kunci keberhasilan penyaluran program ini.



Gambar 4.2 Halaman Depan SDN Gunungsari I

Sumber : Peneliti Sendiri

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, SDN Gunungsari I memiliki sejumlah siswa yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program KIP. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan ketidaktepatan sasaran, di mana terdapat siswa dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu masih menerima bantuan KIP, sementara sebagian siswa dari keluarga tidak mampu belum berhasil didata sebagai penerima manfaat melalui aplikasi SIPINTAR dalam implementasi Program KIP masih mengalami beberapa kendala teknis maupun administratif. Salah satu kendala yang sering terjadi yaitu sistem aplikasi yang mengalami gangguan atau down terutama pada saat periode penginputan maupun pembaruan data penerima KIP. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan dan verifikasi siswa menjadi terhambat karena pihak sekolah tidak dapat mengakses sistem secara maksimal. Selain itu, jaringan internet yang kurang stabil juga mempengaruhi kelancaran penggunaan aplikasi sehingga proses input data sering membutuhkan waktu yang lebih lama.



Gambar 4.3 Website Program SIPINTAR

Sumber : pip.kemendikdasmen.go.id

Berdasarkan gambar diatas permasalahan lain yang ditemukan yaitu masih adanya orang tua atau wali murid yang kurang memahami penggunaan website program dan sistem administrasi berbasis digital. Sebagian orang tua mengalami kesulitan saat login atau mengakses informasi terkait Program KIP karena keterbatasan pemahaman teknologi. Selain itu, masih kurangnya penyuluhan atau sosialisasi secara menyeluruh mengenai tata cara penggunaan SIPINTAR dan prosedur pengajuan KIP menyebabkan beberapa wali murid merasa bingung dalam proses pengajuan bantuan dan proses pengecekan sampai pencairan. ⁷⁰ K⁷⁰alisi inilah yang menjadi fokus penelitian ini untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teori implementasi George Edward III.

4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan temuan lapangan yang ⁵⁵ dianalisis berdasarkan empat variabel teori Implementasi Kebijakan George Edward III. ⁵² Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Kelurahan Gunungsari dan SDN Gunungsari I Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya.

35 4.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel pertama dalam teori implementasi George Edward III yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari. Dalam teori ini, komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya transmisi informasi yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana di lapangan maupun kepada masyarakat penerima manfaat.

Ibu Dwi Kartika Setiawaty, Smk.H. (Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari) menginformasikan:

“Kalau untuk Program KIP itu, pihak kelurahan membantu masyarakat terutama orang tua siswa terkait informasi pengajuan bantuan, syarat-syarat administrasi, sampai pendataan calon penerima manfaat. Biasanya syarat yang diminta seperti Kartu Keluarga (KK), KTP orang tua, akta kelahiran anak, Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) atau DTKS jika ada, serta NISN siswa yang harus valid. Informasi biasanya disampaikan lewat pihak sekolah, RT/RW, atau masyarakat datang langsung ke kelurahan untuk bertanya terkait KIP.”

“Sekarang pengajuan KIP juga berkaitan dengan aplikasi SIPINTAR untuk pengecekan data penerima bantuan. Jadi pihak sekolah dan kelurahan ikut membantu apabila ada masyarakat yang bingung terkait prosesnya. Tetapi selama di lapangan masih ada beberapa kendala, Mbak. Kadang aplikasinya error atau down saat banyak yang mengakses. Selain itu masih ada orang tua siswa yang kesulitan login atau menggunakan aplikasi karena belum terlalu paham teknologi.”

“Kendala lainnya sekarang proses penerima KIP juga semakin ketat, Mbak. Jadi penerima bantuan diprioritaskan dari keluarga kurang mampu dan terdata dalam DTKS atau kategori keluarga sejahtera dengan penghasilan tertentu. Kadang ada masyarakat yang merasa layak menerima bantuan, tetapi tidak lolos karena pada pendataan dianggap masih mampu. Misalnya ada keluarga yang memiliki cicilan kendaraan atau barang tertentu, sehingga dalam pendataan dianggap kondisi ekonominya masih cukup. Selain itu ada juga kendala data siswa yang belum sinkron, misalnya NISN tidak valid atau datanya belum masuk di sistem. Jadi proses pengajuan bantuan harus diperbaiki dulu datanya oleh pihak sekolah atau operator. Karena itu pihak

kelurahan tetap koordinasi dengan sekolah supaya proses pengajuan dan penyaluran KIP bisa berjalan lebih baik.”

Bapak Aidil Setiawan, S.Pd. (Staf TU SDN Gunungsari I) menginformasikan:

“Pihak sekolah biasanya membantu menyampaikan informasi Program KIP kepada orang tua siswa, mulai dari persyaratan, jadwal pengumpulan berkas, hingga tahapan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan. Informasi biasanya disampaikan melalui wali kelas dan grup Whats.App orang tua siswa.”

“Kami juga membantu melakukan pengecekan data siswa seperti NISN dan dokumen administrasi lainnya. Namun, masih ada kendala seperti data siswa yang belum sinkron dan sebagian orang tua yang masih kurang memahami penggunaan aplikasi SIPINTAR.”

“Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Dinas Pendidikan serta memberikan pendampingan kepada orang tua agar proses pendataan dan penyaluran KIP dapat berjalan dengan lancar.”

Ibu Dian (Orang Tua Siswa Penerima Manfaat KIP) menginformasikan:

“Menurut saya informasi tentang Program KIP itu sudah ada, tapi kadang masih bikin bingung, Mbak, terutama untuk orang tua yang kurang paham sistem online. Waktu awal pengajuan saya juga sempat bingung alurnya bagaimana dan cara cek bantuan di aplikasi.”

“Saya tahu informasi KIP dari pihak sekolah sama media sosial. Pernah juga tanya langsung ke kelurahan. Selain itu saya pernah mengalami kendala waktu mau cek data bantuan karena aplikasinya susah diakses dan jaringan internetnya kurang stabil.”

⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Kelurahan Gunungsari, diketahui bahwa sosialisasi Program KIP kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, antara lain melalui pengumuman di kantor kelurahan, penyebaran informasi melalui RT/RW, serta sosialisasi langsung di lingkungan sekolah. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam hal kejelasan informasi yang diterima oleh

sebagian masyarakat, terutama terkait kriteria dan prosedur pendaftaran penerima KIP.

Koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pihak kelurahan, dan SDN Gunungsari I sebagai sekolah penerima program juga menjadi aspek penting dalam dimensi komunikasi. Dalam praktiknya, alur komunikasi dari pusat hingga ke tingkat sekolah dan masyarakat masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi terkait pembaruan data penerima KIP. Hal ini berdampak pada terjadinya kesenjangan antara data yang dimiliki pusat dengan kondisi riil di lapangan, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

⁶ 4.2.2 Sumber Daya

Variabel kedua dalam teori implementasi George Edward III⁴ adalah sumber daya (resources), yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari.

Ibu Dwi Kartika Setiawaty, S.H. (Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari) menginformasikan:

“Dalam pelaksanaan Program KIP, para pelaksana seperti pihak sekolah, operator sekolah, dan pihak kelurahan berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat terkait proses pengajuan bantuan. Pelaksana juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengecekan data maupun penggunaan website SIPINTAR.”

“Namun selama pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, Mbak, terutama karena banyak masyarakat yang datang secara bersamaan untuk mengurus bantuan KIP, sehingga pelaksana harus menangani banyak pengajuan dalam waktu yang sama. Selain itu, terkadang masih terdapat miskomunikasi terkait informasi persyaratan maupun pembaruan data karena tidak semua masyarakat langsung memahami penjelasan yang diberikan.”

“Pelaksana juga harus menyesuaikan proses pendataan dengan ketentuan yang ada pada sistem dan data DTKS. Jadi apabila ada masyarakat yang datanya belum sesuai atau belum masuk dalam kategori penerima bantuan, pihak pelaksana tidak bisa langsung memasukkan sebagai penerima KIP dan harus mengikuti prosedur yang berlaku.”

“Selain proses pendataan, pelaksana juga membantu memberikan informasi terkait pencairan anggaran bantuan KIP kepada orang tua siswa. Dana bantuan dicairkan melalui Bank BNI sesuai ketentuan pemerintah dan digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa. Dalam proses pencairannya terkadang masih ada kendala seperti keterlambatan informasi pencairan atau orang tua siswa yang masih bingung terkait prosedur pengambilan dana bantuan.”

Bapak Aidil Setiawan, S.Pd. (Staf TU SDN Gunungsari I) menginformasikan:

“Dalam mendukung pelaksanaan Program KIP, sekolah berperan dalam membantu pengelolaan data siswa yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Kami memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian data siswa sebelum diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Untuk menunjang pelaksanaan program, sekolah memanfaatkan fasilitas yang tersedia seperti komputer dan akses internet. Namun pada waktu tertentu, proses penginputan maupun pengecekan data dapat terkendala apabila sistem mengalami gangguan atau akses jaringan kurang stabil.”

“Selain itu, jumlah petugas yang menangani administrasi program masih terbatas karena harus menjalankan tugas sekolah lainnya secara bersamaan. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap berupaya memberikan pelayanan yang maksimal agar proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik.”

Ibu Dian (Orang Tua Siswa Penerima Manfaat KIP) menginformasikan:

“Menurut saya pihak sekolah dan kelurahan sudah cukup membantu menjelaskan terkait Program KIP. Waktu saya bingung mengenai proses pengajuan dan pengecekan bantuan, pihak pelaksana membantu memberikan arahan.”

“Namun kadang saya masih merasa bingung karena informasi yang diterima cukup banyak dan prosesnya harus menyesuaikan dengan data yang ada di sistem.”

“Untuk pencairan bantuan juga dibantu penjelasannya oleh pihak sekolah dan bank, tetapi kadang informasi pencairan tidak langsung diketahui sehingga saya harus bertanya lagi ke sekolah atau mengecek sendiri melalui website.”

Berdasarkan hasil wawancara dari segi sumber daya manusia, pihak kelurahan dan sekolah memiliki keterbatasan jumlah personel yang menangani administrasi Program KIP. Petugas yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima KIP juga merangkap tugas-tugas administratif lainnya, sehingga proses pendataan dan pembaruan data tidak dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu. Kondisi ini berpotensi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakakuratan data penerima manfaat Program KIP.

Dari aspek anggaran, Program KIP di tingkat kota Surabaya diimplementasikan melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah. Penyaluran dana KIP dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening siswa penerima melalui Bank penyalur yang ditunjuk. Meskipun mekanisme penyaluran ini telah terstruktur dengan baik, namun masih ditemukan kendala teknis seperti rekening yang tidak aktif atau data identitas siswa yang tidak valid, sehingga menghambat kelancaran pencairan dana bantuan, serta masih banyaknya orang tua siswa yang masih bingung dalam proses pengajuan hingga pencairan.

²⁷ 4.2.3 Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edward III. Disposisi yang baik dari para implementor ditandai dengan adanya komitmen, kejujuran, dan demokratisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Ibu Dwi Kartika Setiawaty, S.H. (Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari) menginformasikan:

“Dalam pelaksanaan Program KIP, para pelaksana seperti pihak sekolah, operator sekolah, dan pihak kelurahan berupaya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam proses pengajuan bantuan, pengecekan data, maupun memberikan informasi terkait pencairan dana KIP.”

“Selain itu, pelaksana juga berusaha bersikap responsif terhadap masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pengajuan bantuan. Jadi ketika ada orang tua siswa yang belum memahami alur pengajuan atau mengalami kesulitan dalam pengecekan data di website SIPINTAR, pihak pelaksana tetap memberikan arahan dan penjelasan agar masyarakat lebih memahami prosedur yang berlaku.”

“Namun dalam pelaksanaannya, pelaksana tetap harus berpegang pada aturan dan data yang sudah ditetapkan dalam sistem. Jadi apabila terdapat masyarakat yang datanya belum sesuai, belum masuk DTKS, atau dianggap belum memenuhi kategori penerima bantuan, pihak pelaksana tidak dapat langsung menetapkan sebagai penerima KIP dan harus mengikuti prosedur yang berlaku.”

Bapak Aidil Setiawan, S.Pd. (Staf SDN Gunungsari I) menginformasikan:

“Pihak sekolah selalu berupaya menjalankan Program KIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membantu proses pendataan siswa yang diusulkan sebagai penerima bantuan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian bersama.”

“Masih ada masyarakat yang mempertanyakan penetapan penerima bantuan karena ditemukan kondisi di mana ada siswa yang dianggap layak menerima tetapi tidak memperoleh bantuan, sementara terdapat penerima yang menurut pandangan masyarakat dinilai memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Kondisi tersebut sering menimbulkan keluhan dan pertanyaan dari orang tua siswa.”

“Selain itu, proses verifikasi penerima sangat bergantung pada data yang tersedia dalam sistem. Oleh karena itu, apabila terdapat data yang belum

diperbarui atau belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, hal tersebut dapat memengaruhi ketepatan sasaran penerima bantuan. ”

“Kami berharap proses pendataan dan verifikasi ke depan dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga penyaluran Program KIP benar-benar diberikan kepada siswa yang membutuhkan dan dapat mengurangi berbagai keluhan yang muncul di masyarakat. ”

Ibu Dian (Orang Tua Siswa Penerima Manfaat KIP) menginformasikan:

“Menurut saya petugas dari sekolah maupun kelurahan cukup membantu saat saya mengurus Program KIP. Waktu saya bingung mengenai proses pengajuan dan pencairan bantuan, petugas menjelaskan dengan baik dan memberikan arahan terkait langkah yang harus dilakukan. ”

“Selain itu, petugas juga tetap melayani dengan sabar ketika saya bertanya mengenai data bantuan maupun proses pengecekan di website SIPINTAR.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas kelurahan dan pihak sekolah, secara umum para implementor Program KIP di Kelurahan Gunungsari menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai tujuan Program KIP sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Sikap responsif para pelaksana terhadap laporan dan keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan penerima KIP juga perlu mendapat perhatian. Beberapa orangtua yang menyampaikan pengaduan terkait ketidaksesuaian penerima manfaat menyatakan bahwa tindak lanjut atas pengaduan mereka masih lambat dan kurang memuaskan. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan komitmen dan tanggung jawab para implementor dalam menjawab aspirasi masyarakat demi memastikan program berjalan tepat sasaran.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Variabel keempat dalam teori implementasi George Edward III adalah struktur birokrasi, yang mencakup Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi kewenangan antar lembaga yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku atau terfragmentasi dapat menjadi penghambat keberhasilan implementasi program.

Dalam implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari, terdapat beberapa instansi yang terlibat secara bersamaan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di tingkat pusat, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pihak kelurahan, SDN Gunungsari I sebagai sekolah penerima program, dan Bank penyalur yang ditunjuk pemerintah. Banyaknya instansi yang terlibat ini menuntut adanya koordinasi yang kuat dan mekanisme komunikasi yang jelas antar pihak agar program dapat berjalan dengan optimal.

bu Dwi Kartika Setiawaty, S.H. (Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari) menginformasikan:

“Dalam pelaksanaan Program KIP, pembagian tugas antar pelaksana sudah cukup jelas, Mbak. Pihak sekolah biasanya bertugas melakukan pendataan siswa, pengecekan kelengkapan berkas, serta membantu proses pengajuan bantuan. Kemudian pihak kelurahan membantu pelayanan administrasi dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait prosedur Program KIP. Selain itu, pelaksanaan Program KIP juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemendikbud karena data penerima bantuan harus menyesuaikan ketentuan dari pemerintah pusat.”

“Selain itu, dalam pelaksanaan Program KIP juga sudah ada prosedur dan tahapan yang harus dijalankan oleh pelaksana. Mulai dari proses pendataan siswa, verifikasi data, pengecekan DTKS, sampai proses pencairan bantuan melalui Bank BRI semuanya mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi pelaksana harus bekerja sesuai prosedur agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan tertib.”

“Kalau terdapat kendala seperti data siswa belum sinkron, NISN tidak valid, atau data belum masuk dalam sistem, biasanya pihak sekolah dan kelurahan akan melakukan koordinasi dengan operator sekolah, Dinas Pendidikan,

maupun pihak Kemendikbud. Jadi antar pelaksana saling bekerja sama supaya proses pengajuan bantuan tetap bisa diproses sesuai ketentuan.”

Bapak Aidil Setiawan, S.Pd. (Staf SDN Gunungsari I) menginformasikan:

50
Dalam pelaksanaan Program KIP, setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pihak sekolah berperan dalam mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan data siswa sebelum disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.”

“Pelaksanaan program ini memerlukan koordinasi antara sekolah, kelurahan, dan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, setiap usulan atau perbaikan data tidak dapat langsung diproses saat itu juga karena harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan verifikasi terlebih dahulu.”

“Biasanya orang tua siswa ingin segera mengetahui hasil pengajuan atau pencairan bantuan, tetapi pihak sekolah juga harus menunggu informasi dari instansi terkait. Lama prosesnya tidak selalu sama, bisa beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung kelengkapan data, proses verifikasi, dan jadwal penetapan penerima bantuan.”

“Meskipun demikian, pihak sekolah tetap berupaya memberikan informasi terbaru kepada orang tua siswa dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar pelaksanaan Program KIP dapat berjalan dengan baik.”

Ibu Dian (Orang Tua Siswa Penerima Manfaat KIP) menginformasikan:

“Waktu saya mengurus Program KIP, pihak sekolah menjelaskan kalau setiap tahapan pengajuan memang harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Jadi saya diminta melengkapi data terlebih dahulu sebelum bantuan diproses.”

“Kalau ada data yang kurang sesuai atau belum masuk sistem, biasanya saya diarahkan untuk memperbaiki dulu datanya. Jadi menurut saya prosesnya memang mengikuti aturan yang sudah ditentukan dari pihak sekolah maupun sistem KIP.”

Berdasarkan temuan di lapangan Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata cara pendataan, verifikasi, dan penyaluran dana KIP sudah tersedia dalam bentuk regulasi yang jelas. 4 Namun dalam praktiknya,

implementasi SOP tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. Proses verifikasi yang membutuhkan banyak tahapan dan keterlibatan berbagai pihak seringkali memakan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat ketepatan waktu penyaluran bantuan kepada siswa yang berhak menerimanya.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan proses penyaluran bantuan membutuhkan waktu yang cukup lama. Keterlambatan tersebut umumnya terjadi karena proses verifikasi dan validasi data harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa pihak yang berbeda. Data yang diajukan oleh sekolah harus diperiksa kembali kesesuaiannya dengan data yang terdapat dalam sistem pemerintah, termasuk data kependudukan dan data kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.

4.3 Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dilaksanakan melalui kerja sama antara pihak sekolah, kelurahan, Dinas Pendidikan, serta pemerintah pusat melalui Kemendikbud dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, implementasi kebijakan Program KIP dianalisis menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

4.3.1 Analisis Kinerja Kebijakan Program KIP

Analisis kinerja kebijakan dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunung Sari Kota Surabaya telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, aspek komunikasi dalam implementasi Program KIP telah berjalan baik dan berhasil. Pihak sekolah, kelurahan, serta Dinas Pendidikan berupaya menyampaikan informasi terkait Program KIP kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung, media sosial, maupun penyampaian informasi melalui RT/RW dan pihak sekolah. Informasi yang disampaikan meliputi persyaratan pengajuan bantuan, prosedur pendataan, pengecekan bantuan, hingga proses pencairan dana KIP. Selain itu, masyarakat juga memperoleh informasi terkait penggunaan website SIPINTAR yang digunakan untuk membantu pengecekan data penerima bantuan. Pihak sekolah dan kelurahan turut membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, komunikasi dalam implementasi Program KIP dapat dikatakan cukup baik karena informasi telah disampaikan⁵⁶ kepada masyarakat melalui beberapa media. Namun demikian, masih terdapat masyarakat terutama orang tua siswa yang belum sepenuhnya memahami prosedur pengajuan bantuan dan penggunaan website SIPINTAR sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi secara lebih menyeluruh.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan¹⁵ Gunungsari, pihak sekolah, dan orang tua siswa penerima manfaat, aspek sumber daya dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari¹⁷ dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Petugas yang menangani administrasi dan pendataan KIP di sekolah maupun kelurahan tidak hanya berfokus pada Program KIP⁷ tetapi juga merangkap tugas administratif lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan, verifikasi, dan pembaruan data penerima bantuan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan dalam waktu yang bersamaan membuat beban kerja pelaksana semakin tinggi. Akibatnya, proses pendataan dan verifikasi data membutuhkan waktu yang lebih lama serta berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data penerima

manfaat. Meskipun pihak sekolah dan kelurahan telah berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya yang dimiliki menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KIP di Kelurahan Gunungsari belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai sebagaimana yang dikemukakan dalam teori George C. Edward III.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi Program KIP. Berdasarkan hasil wawancara, pihak sekolah, operator sekolah, dan pihak kelurahan menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat selama proses pengajuan bantuan berlangsung. Pelaksana berupaya memberikan pelayanan, arahan, dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendataan maupun pengecekan bantuan. Selain itu, pelaksana juga berusaha menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku pada sistem dan data DTKS. Sikap responsif pelaksana terlihat ketika masyarakat mengalami kesulitan terkait data siswa, penggunaan website SIPINTAR, maupun proses pencairan bantuan KIP.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi pelaksana dinilai cukup baik karena pelaksana memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan Program KIP. Namun demikian, masih terdapat beberapa masyarakat yang merasa bingung terhadap prosedur pengajuan bantuan sehingga diperlukan peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Gunungsari, pihak sekolah, dan orang tua siswa penerima manfaat, aspek struktur birokrasi dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari dapat dikatakan belum berhasil. Meskipun telah tersedia Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan serta adanya pembagian tugas yang jelas antara sekolah, kelurahan, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, dan bank penyalur, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Proses administrasi yang harus melalui beberapa tahapan

dan melibatkan banyak instansi menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara efektif.

Kondisi tersebut terlihat dari lamanya proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan karena setiap usulan harus diperiksa kembali kesesuaiannya dengan data yang terdapat dalam sistem pemerintah. Selain itu, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, proses pengajuan harus menunggu perbaikan dan pemeriksaan ulang sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Akibatnya, masyarakat sering kali harus menunggu cukup lama untuk memperoleh informasi terkait hasil pengajuan maupun pencairan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari masih belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan peningkatan efektivitas koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

4.3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung

¹⁹ Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuhpakis Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuhpakis Kota Surabaya.

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Dalam implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari, terdapat beberapa faktor pendukung yang turut berkontribusi pada keberhasilan program secara umum. Berdasarkan temuan lapangan, ¹⁵ faktor-faktor pendukung tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, ²⁸ adanya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan Program KIP di tingkat daerah. Keberadaan peraturan tersebut memberikan acuan yang jelas bagi pihak

sekolah, kelurahan, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan pendidikan kepada siswa penerima manfaat. Selain itu, dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program juga membantu keberlangsungan Program KIP agar tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua, adanya kerja sama dan koordinasi antar pelaksana menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program KIP. Pihak sekolah, operator sekolah, kelurahan, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbud saling berkoordinasi dalam proses pendataan dan pengecekan data penerima bantuan. Selain itu, pelaksana di lapangan juga membantu memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan bantuan maupun pengecekan data di website SIPINTAR.

Ketiga, adanya dukungan masyarakat dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan turut mendukung pelaksanaan Program KIP. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat dalam melakukan pengajuan bantuan pendidikan untuk anak mereka. Selain itu, masyarakat juga cukup aktif mencari informasi terkait Program KIP baik melalui sekolah, kelurahan, media sosial, maupun website SIPINTAR sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lebih baik.

²⁰ 4.3.2.2 Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari juga menghadapi sejumlah faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, masih adanya kendala pada data penerima manfaat Program KIP. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa data siswa yang belum sinkron, seperti NISN yang tidak valid, data siswa yang belum masuk dalam sistem, maupun data DTKS yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengajuan dan verifikasi bantuan

menjadi terhambat sehingga penyaluran bantuan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Kedua, keterbatasan pelaksana dalam menangani banyaknya pengajuan bantuan juga menjadi hambatan dalam implementasi Program KIP. Pihak sekolah, operator sekolah, dan pihak kelurahan harus menangani proses pendataan, verifikasi, serta pelayanan masyarakat secara bersamaan sehingga dalam beberapa kondisi proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama, terutama saat banyak masyarakat melakukan pengajuan bantuan secara bersamaan.

Ketiga, kendala teknis pada website SIPINTAR turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program KIP. Website terkadang sulit diakses atau mengalami gangguan ketika digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Selain itu, proses sinkronisasi data antara pihak sekolah, kelurahan, Dinas Pendidikan, dan sistem pusat juga terkadang membutuhkan waktu sehingga mempengaruhi proses pengecekan dan pembaruan data penerima bantuan.

Keempat, masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terkait prosedur Program KIP menjadi faktor penghambat lainnya. Beberapa orang tua siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami alur pengajuan bantuan, penggunaan website SIPINTAR, maupun proses pengecekan data bantuan. Selain itu, **terdapat masyarakat yang merasa layak menerima bantuan namun tidak** memenuhi ketentuan yang berlaku karena proses penentuan penerima KIP saat ini lebih ketat dan harus menyesuaikan data DTKS serta kondisi ekonomi keluarga.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program KIP telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya berhasil. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari aspek komunikasi, implementasi Program KIP dapat dikatakan berhasil. Informasi mengenai program telah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti sekolah, kelurahan, RT/RW, media sosial, serta pelayanan informasi secara langsung. Selain itu, pihak sekolah dan kelurahan juga memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait persyaratan administrasi dan penggunaan aplikasi SIPINTAR.

Dari aspek sumber daya, implementasi Program KIP belum berhasil. Keterbatasan jumlah petugas yang menangani program serta tingginya beban kerja pelaksana menyebabkan proses pelayanan, verifikasi, dan pembaruan data belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program secara efektif.

Dari aspek disposisi, implementasi Program KIP dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari komitmen dan tanggung jawab para pelaksana dalam membantu masyarakat selama proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Pelaksana juga berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari aspek struktur birokrasi, implementasi Program KIP belum berhasil. Meskipun telah terdapat pembagian tugas dan prosedur yang jelas, proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan berbagai instansi

menyebabkan pelaksanaan program membutuhkan waktu yang relatif lama. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.

Secara keseluruhan, implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik karena terdapat indikator yang berhasil, yaitu komunikasi dan disposisi. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum berhasil, yaitu sumber daya dan struktur birokrasi, sehingga pelaksanaan Program KIP masih memerlukan perbaikan agar tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari:

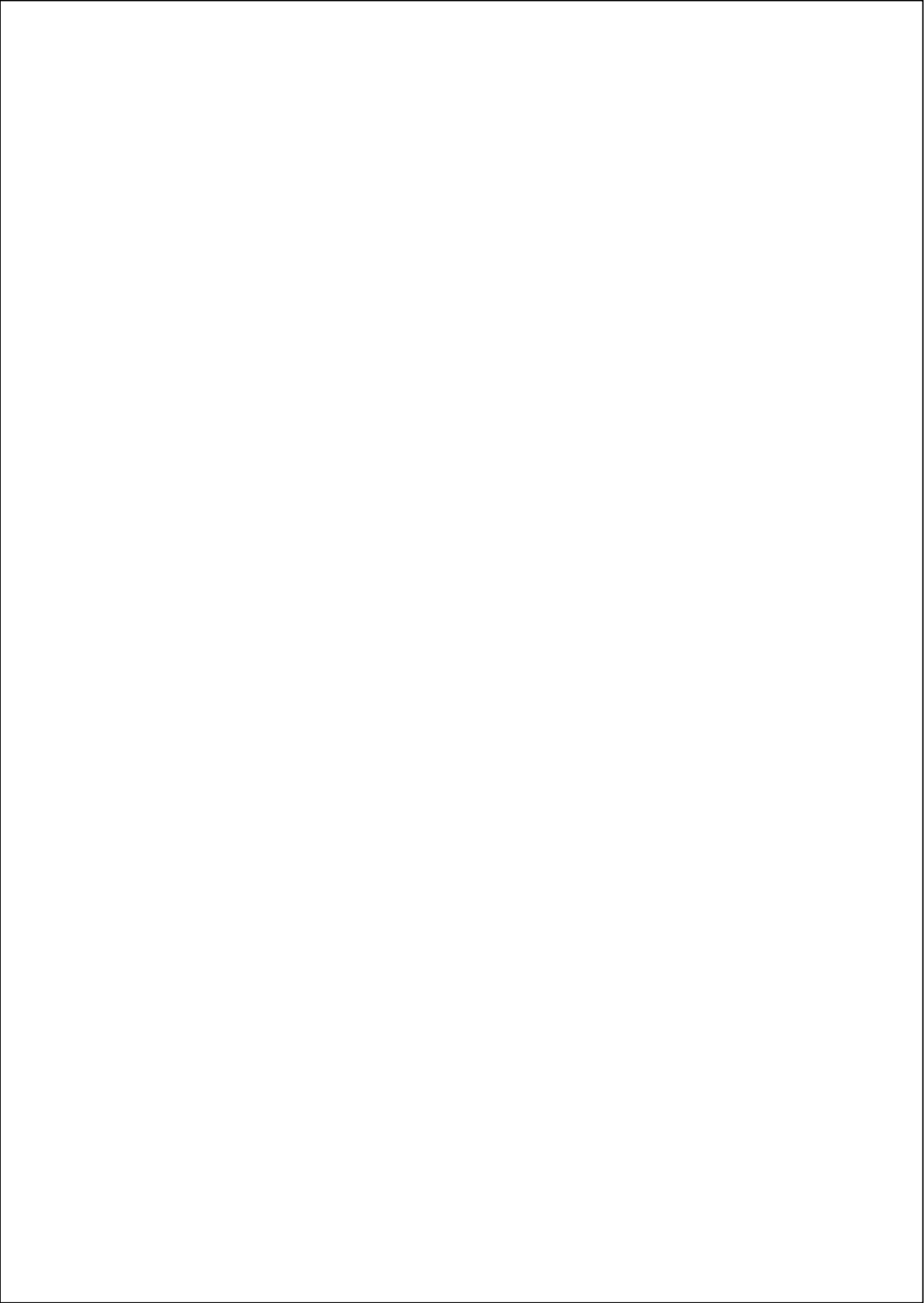
Pertama, kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, disarankan untuk memperkuat sistem verifikasi dan validasi data penerima KIP dengan melibatkan peran aktif RT/RW dan tokoh masyarakat setempat. Pembaruan data secara berkala dan penerapan sistem cross-check dengan data kemiskinan dari instansi lain seperti Dinas Sosial perlu segera diimplementasikan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran program perlu dilakukan penguatan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Program KIP, khususnya pada proses pendataan, verifikasi, dan pembaruan data penerima manfaat. Penambahan petugas atau pembagian tugas yang lebih efektif diperlukan agar beban kerja pelaksana tidak terlalu tinggi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal dan tepat waktu.

Kedua, kepada pihak Kelurahan Gunungsari, disarankan untuk menambah personel khusus yang menangani administrasi Program KIP agar proses pendataan dan verifikasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pelatihan kapasitas teknis bagi petugas kelurahan dalam penggunaan sistem informasi KIP juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, kepada pihak sekolah (SDN Gunungsari I), disarankan untuk lebih proaktif dalam mendata siswa yang berpotensi menerima KIP namun belum terdaftar, khususnya siswa dari keluarga tidak mampu yang belum memiliki akses informasi yang memadai. Koordinasi yang lebih intensif antara pihak sekolah, kelurahan, dan orang tua siswa perlu ditingkatkan untuk memastikan tidak ada siswa berhak yang terlewatkan dari program bantuan ini.

Keempat, kepada pemerintah pusat dan daerah, disarankan untuk mengembangkan sistem integrasi data yang lebih komprehensif antara Kemendikbud, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Penggunaan data tunggal yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time oleh semua pihak yang berkepentingan akan sangat membantu dalam mengurangi kesenjangan data dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima Program KIP.

Kelima, kepada masyarakat penerima manfaat, diharapkan untuk lebih aktif dalam mengakses informasi terkait Program KIP dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan penerima manfaat di lingkungan mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola program bantuan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.



ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Ulya Sabina Putri, Artha Dini Akmal.
"Implementasi Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung
Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan
terhadap Efektivitas Pendataan dan
Ketepatan Sasaran", YASIN, 2026

Publication

1%

2

jurnal.unipasby.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Fakultas ISIP

Student Paper

<1%

4

Hardi Saputra, Desy Selawaty, Luci Afiani
Oktavia. "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
PERIZINAN PERTAMBANGAN BATU BARA:
STUDI KASUS PT KANITRA MITRA JAYA
UTAMA DI KABUPATEN KAPUAS", Restorica:
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan
Ilmu Komunikasi, 2026

Publication

<1%

5

docplayer.info

Internet Source

<1%

6

Submitted to LPPM

Student Paper

<1%

7	Nada Larissa Ramadhani, Siti Nuraeni, Gilang Firman Faira, Cantika Meta Sari Kinanti, Zulfa Al Dina. "Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) : Studi Literatur", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1 %
8	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
9	bappeko.surabaya.go.id Internet Source	<1 %
10	citranegeri.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
12	news.republika.co.id Internet Source	<1 %
13	rama.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
14	Sandur Aprisca Sihol Bunga, Erdi Erdi, Siti Aisyah. "Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria di Kabupaten Sintang (Studi di Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai)", Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT), 2025 Publication	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %

16	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
18	journal.yrpiiku.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
20	Submitted to Rektorat (ADM) Student Paper	<1 %
21	jdih.surabaya.go.id Internet Source	<1 %
22	media.neliti.com Internet Source	<1 %
23	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
26	Takya Marell Andena, Tepi Peirisal, A Moeslihat Komara. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI UPTD SDN BUDAYASARI DESA CIKAUM TIMUR KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG", The World of Public Administration Journal, 2024 Publication	<1 %

27	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
28	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
29	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
30	smartid.co.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
33	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1 %
34	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
35	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	<1 %
36	kti-keperawatan-komunitas.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
38	123dok.com Internet Source	<1 %
39	surabaya.inews.id Internet Source	<1 %

eprints.uny.ac.id

40	Internet Source	<1 %
41	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
42	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
43	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
44	www.beritawajo.id Internet Source	<1 %
45	Ima Jumrotus Soleha, Choirun Niswah, Lia Efriliyanti. "Pelaksanaan Layanan Publik Di Kantor Kelurahan Lebuay Bandung Kabupaten Lahat", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1 %
46	Nur Fadila Syahrir, Asmun W. Wantu, Yuli Adhani. "Efektivitas Program Beasiswa Daerah dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan di SMP Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
47	bontangpost.id Internet Source	<1 %
48	ejournal.urindo.ac.id Internet Source	<1 %
49	id.123dok.com Internet Source	<1 %

50	issuu.com Internet Source	<1 %
51	journal.uny.ac.id Internet Source	<1 %
52	smartlib.umri.ac.id Internet Source	<1 %
53	Deni Malik, Khansa Suma Rabbani. "Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Menurunkan Angka Stunting di Depok (Studi Kasus pada SD Negeri 02 Gandul, Depok)", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2026 Publication	<1 %
54	Ni Putu Herdina Divya Aristyarani, I Kadek Rian Prayana. "Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Menjaga Kesesuaian Data Administrasi: Studi pada BPK Perwakilan Provinsi Bali", MASALIQ, 2025 Publication	<1 %
55	Rhaisa Indira Putri, Ramadhona Fitri Helmi. "Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam Mewujudkan Keuangan Digital di Pemerintah Kota Padang", YASIN, 2025 Publication	<1 %
56	Rikmanen Zidane. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Kecamatan Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur)", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2021	<1 %

57	Zumaroh Zumaroh. "Evaluation of surveillance of dengue fever cases in the public health centre of Putat Jaya based on attribute surveillance", Jurnal Berkala Epidemiologi, 2015 Publication	<1 %
58	bapenda.malangkab.go.id Internet Source	<1 %
59	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
60	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	<1 %
61	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet Source	<1 %
62	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
63	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
64	health.grid.id Internet Source	<1 %
65	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
66	marhaenisdaritimor.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	oceannaz.wordpress.com Internet Source	<1 %
68	Meiynana, Sari Viciawati Machdum. "POTENSI PENDUKUNG PELAKSANAAN	<1 %

PROGRAM INDONESIA PINTAR: STUDI
KASUS DI KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON", Jurnal Penelitian
Kebijakan Pendidikan, 2020

Publication

69

Roudoh, Wanada Siti Salsabilah, Aji
Wahyudin, Suci Hidayati. "Rethinking the
Indonesia Smart Program (PIP): A Policy
Review and Solutions for Better Student
Outcomes", Nidhomul Haq : Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam, 2025

Publication

<1 %

70

Zidane Alfarizi, Adil Mubarak. "Implementasi
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Gedung Pasar Raya Fase VII di Kota
Padang", YASIN, 2026

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

FINAL GRADE

/100

GENERAL COMMENTS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34
